

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan atas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen, yang telah dilaksanakan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan kegiatan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM dalam hal ini berupa program Bantuan Produktif bagi Usaha Mikro (BPUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen telah tepat dan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen tetap melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sesuai dengan arahan dari pusat yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, selaku pelaksana utama dan penanggung jawab utama dalam proses verifikasi, validasi, dan penyaluran dana BPUM.

Mekanisme pengalokasian dana BPUM dimulai dengan penyerahan data ke Dinas Koperasi dan UKM oleh masyarakat, pembersihan data oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan penetapan penerima BPUM, pencairan dana BPUM berpedoman pada kewenangan perbankan di lingkungan Kementerian Keuangan, oleh Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pembinaan (BPKP). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen sudah menerapkan sesuai dengan prosedur yang

berlaku. Karena Dinas Koperasi dan UKM sebagai fasilitator dalam proses pendaftaran, pengusulan calon penerima BPUM, dan sebagai pemantau dalam proses penyaluran dana BPUM. Adapun besaran dana BPUM pada periode pertama (tahun 2020) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Pada periode kedua (tahun 2021) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Penurunan jumlah ini terjadi karena pengurangan anggaran bantuan sosial yang dialokasikan untuk program vaksinasi *Covid-19*.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sudah tepat sasaran ditujukan oleh pelaku UMKM, tetapi dalam pemerataannya masih belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi kurangnya sosialisasi dan informasi terkait bantuan BPUM dan banyaknya pelaku UMKM yang tidak melek teknologi. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM mengambil langkah untuk menggiatkan sosialisasi sampai tingkat desa secara menyeluruh agar tiap pelaku UMKM mendapatkan informasi bantuan BPUM. Selain itu, proses secara *online* akan tetap berjalan dan proses pendaftaran secara *offline* atau bisa datang langsung di Dinas Koperasi dan UKM akan tetap dilayani. Penerima BPUM diharapkan menjadi lebih sadar akan penggunaan dana BPUM, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan membangun siklus ekonomi yang baik.